

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Empu Jatmika, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Empu Jatmika.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Menurut Sugiyono (2019:22), penelitian kualitatif tidak berorientasi pada generalisasi, melainkan lebih menekankan kedalaman informasi hingga pada tingkat makna dari fenomena yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam

penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Empu Jatmika, Kecamatan Amuntai Tengah.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses wawancara dan observasi. Menurut Sugiyono (2023:9), data yang diperoleh secara langsung dari lapangan disebut sebagai data primer. Data ini digunakan oleh peneliti untuk menjawab fokus permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Empu Jatmika, Kecamatan Amuntai Tengah. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap pelaksanaan penertiban serta situasi di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses pengumpulan data, yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui perantara atau pihak

lain. Data ini umumnya bersumber dari berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti literatur, naskah akademik, maupun arsip tertulis lainnya (Nashrullah et al., 2023:62).

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dokumen serta laporan kegiatan penertiban yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta berbagai buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap mengetahui dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan yang diteliti.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu, di mana informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 13 (tiga belas) orang yang dipilih berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima. Untuk memperjelas komposisi informan penelitian, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Data Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Akhmad Rijali, SE	Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang- undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara	1 Orang
2.	H. Muhammad Yusup, SH, MH	Kepala Seksi Operasional, Pengendalian, Kerja Sama dan Bina Potensi pada Satuan Polisi Pamong Praja	1 Orang
3.	H. Muhammad Aspirayani, AMK	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	1 Orang
4.	Rahmat	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	1 Orang
5.	Cahaya	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1 Orang
6.	Kurdi	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1 Orang
7.	Khairulah	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1 Orang
8.	Salman	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1 Orang
9.	Cahya Sari	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1 Orang
10.	Hadi	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1 Orang
11.	Rusna	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1 Orang

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
12.	Yeny	Masyarakat Pengguna Jalan	1 Orang
13.	Susi	Masyarakat Pengguna Jalan	1 Orang
Jumlah			13 Orang

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Jumlah informan tersebut dapat berkembang sesuai kebutuhan penelitian sampai data yang diperoleh mencapai titik jenuh, yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan kesamaan dan tidak ditemukan data baru yang signifikan.

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Teori ini digunakan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Empu Jatmika.

Dalam penelitian ini, masing-masing variabel dioperasionalkan ke dalam ruang lingkup dan indikator yang dapat diamati di lapangan sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Indikator yang digunakan meliputi transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi instruksi dalam pelaksanaan penertiban PKL.

2. Sumber Daya, merupakan dukungan yang diperlukan agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif. Indikatornya meliputi ketersediaan staf atau sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung.
3. Disposisi, merupakan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan. Indikatornya meliputi komitmen, ketegasan, dan konsistensi pelaksana dalam penerapan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi, merupakan mekanisme kerja organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Indikatornya meliputi kejelasan SOP, koordinasi antar unit, serta pembagian tugas (fragmentasi) antar pelaksana.

Dengan kerangka tersebut, variabel-variabel penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam proses pengumpulan data di lapangan.

Tabel berikut menunjukkan ringkasan operasionalisasi variabel penelitian:

Tabel 3.2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Ruang Lingkup	Indikator
Teori Implementasi Kebijakan (George C. Edward III dalam Agustino,2026)	Komunikasi	a. Transmisi (penyaluran informasi) b. Kejelasan pesan c. Konsistensi Perintah
	Sumber daya	a. Staf b. Fasilitas pendukung

Variabel	Ruang Lingkup	Indikator
	Disposisi	a. Komitmen pelaksana b. Ketegasan pelaksana c. Konsistensi pelaksana
	Struktur Birokrasi	a. Adanya SOP b. Koordinasi dan fragmentasi

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan yang menjadi fokus penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai suatu permasalahan penelitian. Menurut Mahmudah (2021:16), wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara tatap muka dengan partisipan guna mengeksplorasi makna, pengalaman, serta informasi yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat rinci, komprehensif, dan relevan dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan bagi informan untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Wawancara dilakukan kepada informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan, baik sebagai pelaksana maupun pihak yang terdampak kebijakan. Melalui teknik ini diperoleh data mengenai proses implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, serta kondisi yang terjadi di lingkungan penelitian. Melalui pengamatan yang dilakukan secara sistematis, peneliti dapat memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan peristiwa atau fenomena yang diteliti (Mahmudah, 2021:26).

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi tidak terlibat (non-partisipatif), yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan yang diamati. Pemilihan jenis observasi ini bertujuan untuk menjaga objektivitas serta memastikan bahwa proses pelaksanaan kebijakan berlangsung secara alami tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Pengamatan dilakukan terhadap kondisi lapangan, aktivitas Pedagang Kaki Lima di lokasi penelitian, serta bentuk pengawasan atau penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja apabila kegiatan tersebut berlangsung pada saat pengumpulan data. Melalui observasi tidak terlibat ini diperoleh gambaran faktual mengenai dinamika implementasi kebijakan dan situasi nyata di lapangan. Hasil pengamatan dicatat secara sistematis sebagai bahan pendukung dan pembanding terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini tidak dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian, melainkan melalui sumber tertulis maupun visual yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa atau fenomena. Dokumen yang digunakan dapat berupa surat, laporan, arsip, foto, maupun bentuk dokumentasi lainnya yang relevan dengan penelitian (Abrar, 2024:27).

Dalam penelitian ini, dokumen yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, arsip resmi instansi, serta data tertulis lainnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang diteliti. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari wawancara dan observasi, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan terpercaya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama proses pengumpulan data di lapangan, hingga setelah seluruh data terkumpul. Analisis tidak dilakukan secara terpisah dari proses pengumpulan data, melainkan berlangsung secara berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedagang Kaki Lima di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019), yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian terhadap data yang diperoleh di lapangan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi tidak terlibat, dan dokumentasi ditelaah secara menyeluruh, kemudian dipilih bagian-bagian yang relevan dengan fokus penelitian.

Pada tahap ini dilakukan pengelompokan data berdasarkan indikator implementasi kebijakan, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga diperoleh data yang terorganisir dan bermakna. Proses reduksi berlangsung secara terus-menerus selama penelitian hingga penyusunan laporan akhir.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan logis. Data yang telah dikelompokkan berdasarkan indikator kemudian disajikan secara terstruktur agar memudahkan pemahaman terhadap kondisi implementasi kebijakan di lokasi penelitian.

Penyajian data memungkinkan keterkaitan antar temuan dapat terlihat secara jelas, sehingga memudahkan dalam memahami pola,

hubungan, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang diperoleh tidak bersifat sementara, melainkan diverifikasi secara terus-menerus melalui pengecekan ulang terhadap data lapangan, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data yang valid dan konsisten. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan dan dapat dipercaya secara ilmiah. Menurut Sugiyono (2019:365–371), pengujian kredibilitas dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan member check. Berdasarkan pedoman tersebut, uji kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi serta membangun hubungan yang lebih terbuka dengan informan. Dengan adanya interaksi yang lebih intensif, informasi yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan meminimalkan kemungkinan adanya data yang disembunyikan atau kurang lengkap.

2. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan dilakukan dengan cara mengamati secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedagang Kaki Lima. Data yang diperoleh ditelaah kembali secara sistematis untuk memastikan ketepatan pencatatan dan kesesuaian antara hasil wawancara, observasi tidak terlibat,

serta dokumentasi. Dengan ketekunan tersebut, deskripsi mengenai pelaksanaan kebijakan dapat disusun secara lebih akurat.

3. Triangulasi

Triangulasi dilakukan sebagai upaya pengecekan data melalui berbagai sumber dan teknik. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari beberapa informan yang memiliki peran berbeda dalam implementasi kebijakan. Selain itu digunakan triangulasi teknik, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi tidak terlibat, dan dokumentasi. Pengecekan silang ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat konsistensi dan kebenaran yang memadai.

4. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif dilakukan dengan menelusuri kemungkinan adanya data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan utama penelitian. Apabila ditemukan informasi yang tidak sejalan, maka dilakukan penelaahan lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Apabila tidak ditemukan perbedaan yang signifikan, maka temuan penelitian dinilai semakin kuat dan dapat dipercaya.

5. Penggunaan Bahan Referensi

Penggunaan bahan referensi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen resmi, arsip kebijakan, laporan kegiatan, serta dokumentasi visual yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima. Keberadaan dokumen pendukung tersebut berfungsi sebagai bukti autentik yang memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

6. *Member Check*

Member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau interpretasi data kepada informan yang bersangkutan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan telah sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan. Apabila hasil interpretasi disepakati oleh informan, maka data tersebut dinyatakan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.